

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

**Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (outcomes)	Penjelasan/ Form Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
1 Meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya	1 Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah	<p><b>Partisipasi</b> adalah peran serta orang/kelompok dan orang dalam kegiatan seni Budaya kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak dalam pagelaran seni budaya.</p> <p>Persentase meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya adalah Persentase meningkatnya kelompok dan orang yang berperan serta dalam kegiatan seni budaya tahun berjalan (Tahun 2014) dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2013)</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Tahun 2014} - \text{Jumlah Partisipasi Tahun 2013}}{\text{Jumlah Partisipasi Tahun 2013}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Kelompok yang berpartisipasi Tahun 2013 = 130                      Jumlah Kelompok yang berpartisipasi tahun 2014 = 380</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{380 - 130}{130} \times 100 \% = 192\%$ <p><b>Kesimpulan :</b>                      Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat akan kegiatan seni dan budaya daerah Kota Pontianak sebesar 192%</p> <p><b>Apresiasi</b> adalah Jumlah kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni budaya kota Pontianak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak</p> <p>Persentase meningkatnya Apresiasi adalah Persentase meningkatnya kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni dan Budaya tahun sebelumnya (tahun 2013)</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2014} - \text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}}{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Apresiasi masy. dlm kegiatan seni budaya Tahun 2013 = 7.650                      Jumlah Apresiasi masy. dlm kegiatan seni budaya Tahun 2014 = 8.125</p> $\frac{8.125 - 7.650}{7.650} \times 100 \% = 6,21\%$ <p><b>Kesimpulan :</b></p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	Persentase meningkatnya Apresiasi Masyarakat akan kegiatan seni dan budaya daerah Kota Pontianak pada tahun 2014 sebesar 6.21%	
--	--	--

2 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	2 cakupan Kasus KDRT yang ditangani	<b>Perhitungan Rumus</b> $\frac{\text{Kasus yang ditangani}}{\text{Kasus yang dilaporkan}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
	3 KRG (Kategori Responsif Gender)	Kategori responsif gender hanya ada 3, yakni tingkatan netral , pratama, Madya dan Utama (Responsif)	
	4 Kategori Kota Layak Anak	Kategori kota layak anak terdiri dari tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.	
3 Terwujudnya Keluarga berkualitas melalui KB dan Keluarga Sejahtera	5 Persentase jumlah PUS yang ber KB	$\frac{\text{Jumlah PUS di Kota Pontianak yang ber KB}}{\text{Jumlah PUS di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	
4 Meningkatkan pengembangan prestasi kepemudaan	6 Persentase peningkatan pemuda berprestasi	Rumus = $(N - (N-1)/(N-1)) \times 100\%$ Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah penduduk yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Pemuda berprestasi di Kota Pontianak terdiri dari : 1. Paskibra Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota 2. Jambore Pemuda Indonesia/Bhakti Pemuda Antar Provinsi 3. Pertukaran Pemuda Antar Negara 4. Pemuda Pelopor bidang : a. Pendidikan b. Sosial Budaya dan Pariwisata c. Pengelolaan SDA dan Lingkungan d. Industri Pangan dan Kesehatan e. Komunikasi dan Informasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
5 Meningkatkan kualitas pendidikan dan Tenaga Pendidik pada Jenjang SD/MI/SMP, MTS dan SMA/SMK/MA	7 Angka Melek Huruf	$\text{Persentase Angka Melek Huruf} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas secara keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan
	8 Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	
	9 Angka Kelulusan	<b>Perhitungan Rumus</b> $AK_n = \frac{AK_n}{AK_{n-1}} \times 100 \%$ Keterangan AK <sub>n</sub> : Angka Kelulusan tahun ke-n AK <sub>n-1</sub> : Angka Kelulusan tahun ke-n	
	10 Nilai rata-rata ujian	<b>Perhitungan Rumus</b> $\text{Rata-rata Ujian} = \frac{\text{Jumlah nilai ujian mapel keseluruhan}}{\text{Jumlah Mapel yang diujikan}}$	

	11 Angka putus sekolah	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $APTS_{7-18} = \frac{A_{7-18} (PTS)}{A_{7-18}} \times 100\%$ <p>Keterangan  P7-18 (PTS) : Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun yang putus sekolah  P7-18 : Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun</p>	
6 Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	12 Persentase guru yang memiliki sertifikat Pendidik	$\frac{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang memiliki sertifikat pendidik yang masih mengajar}}{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang masih mengajar}} \times 100\%$	
7 Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	13 APK(TK/RA)	<p>Persentase jumlah siswa yang sedang bersekolah pada jenjang TK/RA (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 4 s/d 6 tahun</p> $\frac{\text{Jumlah siswa TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk umur 4-6 tahun}} \times 100\%$	
	14 APK(PAUD)	Peserta didik PAUD yang ada di Pontianak berusia 0-4 tahun	
	15 jumlah anak yang mendapatkan pendidikan berkebutuhan khusus	untuk anak berkebutuhan khusus tidak dapat dihitung APM dan APK nya karena APM dan APK hanya untuk sekolah berjenjang	
	16 APM (TK/RA)	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $APM_{5-6} = \frac{\text{Jumlah Siswa TK/RA usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun}} \times 100\%$	
	17 APM (PAUD)	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $APM_{5-6} = \frac{\text{Jumlah Siswa PAUD 0-4 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-4 tahun}} \times 100\%$	
8 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat	18 Usia harapan hidup	<p>Angka Usia Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur</p> <p>Angka Harapan Hidup pada umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya</p> <p>Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu</p>	Dinas Kesehatan

19 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

=

Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 Tahun

Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

x 100.000

	20 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran	$\text{Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah Bayi (berumur < 1 th) yang meninggal disuatu Wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	Dinas Kehatan
	21 Persentase kecamatan bebas rawan gizi buruk	$\text{Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan dengan Prevalensi Gizi kurang dan buruk pada balita } \leq 15 \% \text{ disuatu wilayah kerja tertentu}}{\text{Seluruh kecamatan disatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun}} \times 100$	
9 Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	22 Persentase kelurahan siaga aktif	$\text{Kelurahan Siaga Aktif} = \frac{\text{Jumlah Kelurahan Siaga yang aktif}}{\text{Jumlah Kelurahan yang dibentuk}} \times 100\%$	
10 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	23 Persentase Puskesmas Berakreditasi	$\text{Puskesmas Berakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak}} \times 100\%$	
	24 Persentase pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi syarat	$\text{Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi syarat} = \frac{\text{Jumlah pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Pelayanan Kesehatan Swasta}} \times 100\%$	
11 Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	25 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar	$\text{Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlindungi kesehatannya dengan sistem jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	
12 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	26 Persentase PMKS yang dapat ditangani	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Kejadian yang ditangani}}{\text{Kejadian yang terjadi}} \times 100 \%$	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

**Misi 2 : Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (outcomes)	Penjelasan/ Form Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
13 Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	27 Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Pegawai yang direncanakan mengikuti Diklat}} \times 100 \%$ <p>Terpenuhinya pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kompetensinya dengan jenis Diklat Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Diklat Formasi Bimtek PNS, Bimtek Prajabatan dan Diklat Perjenjangan</p>	Badan Kepegawaian Daerah
	28 Persentase penurunan Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ASN	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang melanggar Displin}}{\text{Jumlah keseluruhan Pegawai}} \times 100 \%$ <p>Terpenuhinya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai</p>	
	29 Persentase pegawai yg berkinerja baik (SKP >76)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan SKP Baik}}{\text{Jumlah Pegawai Kota Pontianak}} \times 100 \%$ <p>Terpenuhinya Penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai lebih dari atau sama dengan Tujuh Puluh Enam (76)</p>	
14 Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	30 Persentase SKPD hasil evaluasi SAKIP yang Akuntabilitas Kinerja "Baik"	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang akuntabilitas Kinerja Baik}}{\text{Jumlah SKPD hasil Evaluasi}} \times 100 \%$ <p>Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD yang akuntabilitas kerjanya "Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas Fakta objektif instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p> <p>Persentase informasi publik yang dipublikasikan = (jumlah informasi publik yang dipublikasikan : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan) x 100%. Yang dimaksud disediakan berdasarkan permintaan informasi, sedangkan yang dimaksud dengan diumumkan adalah hal-hal yang wajib diumumkan berdasarkan peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Data diperoleh dengan membandingkan Persentase SKPD hasil Evaluasi SKPD Hasil Evaluasi SAKIP yang akuntabilitas Kinerja yang "Baik" dengan jumlah SKPD hasil Evaluasi</p> <p>Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan jumlah SKPD yang akuntabilitas Kinerja bail dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p>	Inspektorat

	<p>31 Persentase unit Pelayanan Publik yang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Kategori "Baik"</p>	$\frac{\text{Jumlah hasil survei yang berkategori baik}}{\text{Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei IKM}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan</p> <p>Laporan Survei Kepuasan Masyarakat disampaikan oleh unit kerja, baik yang melakukan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. sebanyak 2 kali atau per semester. Pada tahun 2014, untuk semester 1 sebanyak 99 unit kerja yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata 79,523 (kategori : Baik) dari total 110 unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% dari 110 unit pelayanan yaitu 82 Unit Pelayanan Publik dan untuk semester 2 sebanyak 95 unit kerja yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata :88,271 (Kategori Baik) dengan target yang sama yaitu sebesar 75% Unit Pelayanan Publik berkategori baik.</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>
<p>15 Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan</p>	<p>32 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	$\frac{\text{Tingkat capaian tahun yang dilaporkan}}{\text{capaian yang ditargetkan}} \times 100 \%$ <p>Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat Profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan</p> <p>Opini BPK didasarkan pada kreteria antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah</li> <li>2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)</li> <li>3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Efektif Sistem Pengendalian Interen (SPI)</li> </ol> <p>Salah satu indikator kualitas Akuntabilitas Keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi :Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Opini BPK secara bertingkat terdiri dari : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Of Opinion), Tidak Wajar (Adversed Opinion), Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), Dampak dari yang diperolehnya opini selain WTP atas laporan Keuangan Pemerintah pemerintah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang Keberhasilan Program Kerja Pemerintah</li> <li>2. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan negara/ daerah</li> </ol> <p>Data diperoleh dengan membandingkan Opini BPK RI yang dicapai dengan Opini BPK RI yang ditargetkan sedangkan Persentase peningkatan adalah peningkatn opini BPK RI tahu yang dilaporkan dibandingkan dengan tahu sebelumnya</p>	<p>Inspektorat</p>



	<p>33 Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Pontianak yang selesai ditindaklanjuti sesuai Rekomendaasi</p>	$\frac{\text{Jumlah temuan yang di TL sesuai Rekomendasi}}{\text{Rekomendasi}} \times 100 \%$ <p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil Pemeriksaan</p> <p>b. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan</p> <p>c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima</p> <p>2. PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas BPK LKKL, LKBUN, dan LKPP</p> <p>3. Temuan Aparat Pengawas yang ditindak lajuti selaim eksternal (BPK) adalah Internat yaitu :</p> <p>1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>2. Inspektorat Kota Pontianak</p> <p>Data diperoleh dengan membandingkan Persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi dengan jumlah Rekomendasi</p> <p>Sedangkan Persentase Peningkatan adalah peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>Inspektorat</p>
<p>16 Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah</p>	<p>34 Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah</p>	<p><b>Cara Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Yang Dilaporkan} - \text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun sebelumnya ( N-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun sebelumnya (N-1)}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan</b></p> <p>Dalam meningkatkan kemandirian daerah pada sektor pengelolaan keuangan, terutama pada penerimaan asli daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, maka salah satu ukuran adalah meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah.</p> <p>Sedangkan Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah adalah persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (N-1).</p>	<p>Dinas Pendapatan Daerah</p>

**Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (outcomes)	Penjelasan/ Form Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
17 Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	35 Persentase SKPD yang memiliki website yang update	<p>Situs Web (Website) adalah suatu halaman Web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada Peladen (Pelayanan) yang sama kumpulan informasi yang disampaikan secara perorangan, kelompok atau organisasi.</p> <p>Website yang Update adalah informasi yang disampaikan/dikelola oleh suatu SKPD yang secara berkala dilakukan pembaruan atau selalu melakukan pembaharuan dan penambahan informasi/data</p> <p><b>Cara Perhitungan Rumus</b></p> $\text{Persentase SKPD yang memiliki Website yg Update} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang Mengupdate Websitenya secara berkala}}{\text{Jumlah SKPD di Kota Pontianak}} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan</b></p> <p>Jumlah SKPD di Kota Pontianak 34, ditambah Sekretariat Daerah Kota = 35</p> <p>Jumlah Website yang di Update =29 SKPD</p> $\text{Jadi} = \frac{29}{35} \times 100 \% = 82,86 \%$ <p>Kesimpulan : Jadi Capaian IKU Kota Persentase SKPD yang memiliki Website yang di Up Date adalah sebesar 82,86 %</p>	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	36 persentase informasi publik yang dipublikasikan	$\frac{\text{Target capaian tahun yang dilaporkan}}{\text{Tingkat capaian yang ditargetkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan - Target informasi yang wajib diumumkan merupakan informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic,wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa dll informasi yang wajib diumumkan merupakan informasi berdasarkan peraturan komisi informasi no 1 tahun 2010tentang standar layananana informasi publik</p>	Sekretariat Daerah

18 Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	37 persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi adalah semua kejadian bencana diwilayah kota Pontianak, baik kebakaran gedung, perumahan, lahan, putting beliung, banjir dan lain-lain yang mendapatkan penanganan dari BPBD Kota Pontianak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	38 Persentase jalan kota dalam kondisi baik	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{PJB}{PDB} \times 100 \%$ <p>PJB : Panjang jalan dalam kondisi baik PDB : Panjang jalan keseluruhan berdasarkan database</p>	Dinas Pekerjaan Umum
	39 Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{JJB}{JDB} \times 100 \%$ <p>JJB : Jumlah Jembatan kondisi baik atau secara teknis layak digunakan JDB :Jumlah jembatan keseluruhan berdasarkan database</p>	
20 Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	40 Persentase saluran drainase dengan kondisi baik	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{PSB}{PSDB} \times 100 \%$ <p>PSB : Panjang Saluran dalam kondisi baik PSDB : Panjang saluran keseluruhan berdasarkan database</p>	
	41 Luas genangan	<p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{LTD}{LCA} \times 100 \%$ <p>LTD : Luas area/kawasan yang telah ditangani LCA : Luas Calchment Area yang ada</p>	

<p>21 Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah</p>	<p>42 Tingkat Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	<p>Penjelasan Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu linyas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan di jalan (PP 32 tahun 2011) Evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas merupakan kegiatan pengolahan data untuk mengetahui tingkat pelayanan dan indikasi penyebab masalah yang terjadi pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan</p> <p><b>Indikator tingkat pelayanan yang dipergunakan</b></p> <p>a. Kecepatan rata-rata b. Misbah volume/kapasitas (V/C ratio) C. Kepadatan lalu lintas</p> <p><b>Cara Perhitungan Rumus</b></p> <p><b>a. Kecepatan rata-rata</b></p> $K = \frac{60 \sum N_j}{\sum W}$ <p>Dimana : K = Kecepatan perjalanan (KM/Jam) J = Panjang Rute (KM) <math>\sum W</math> = Jumlah Waktu tempuh untuk semua kendaraan sampel kendaraan N = Jumlah sampel kendaraan</p> <p><b>b. Misbah volume/Kapasitas (V/C ratio)</b></p> $LOS = \frac{\text{Vol. Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} = \frac{V \cdot \text{Smp/jam}}{C \cdot \text{Smp/jam}}$ <p>LOS = Tingkat Pelayanan</p> $C \text{ (Kapasitas Jalan)} = C_o \times F_w \times F_{sp} \times F_{sf} \times F_{cs}$ <p>Dimana : C<sub>o</sub> = Kapasitas Dasar (tabel) F<sub>w</sub> = Faktor penyesuaian lebar jalan (tabel) F<sub>sp</sub> = Faktor penyesuaian arah lalu lintas (tabel) F<sub>sf</sub> = Faktor hambatan samping (tabel) F<sub>cs</sub> = Faktor ukuran kota (tabel) F<sub>cs</sub> = Faktor ukuran kota (tabel)</p>	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p>
---	---	---	--

		<p><b>C. Kepadatan Lalu lintas</b></p> <p>Kepadatan adalah jumlah rata-rat kendaraan persatuan panjang jalur gerak dalam waktu tertentu dan dapat dihitung dengan rumus</p> $K = \frac{N}{L}$ <p>Dimana</p> <p>K = Kepadatan (Kend/KM)  N = Jumlah Kendaraan di jalan  L = Panjang jalan (KM)</p> <p><b>d. Kecelakaan Lalu Lintas</b></p> <p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan sesuai fungsinya sebagai berikut :</p> <p>a, Jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C  b, Jalan Kolektor sekunder,tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C  c, Jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D  d, Jalan lingkungan,tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D</p> <table border="1" data-bbox="989 716 1878 980"> <thead> <tr> <th>Tingkat Pelayanan</th> <th>Karakteristik Operasi Terkait</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">C</td> <td>- Arus Stabil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d &gt; 30 KM/jam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- V/C ratio &lt; 0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Load faktor &lt; 0.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">D</td> <td>- Mendekati arus tidak stabil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d &gt; 25 KM/jam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- V/C ratio &lt; 0.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Load faktor &lt; 0.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait					C	- Arus Stabil					- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 KM/jam					- V/C ratio < 0.8					- Load faktor < 0.3					D	- Mendekati arus tidak stabil					- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 25 KM/jam					- V/C ratio < 0.9					- Load faktor < 0.7					Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait																																																		
C	- Arus Stabil																																																		
	- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 KM/jam																																																		
	- V/C ratio < 0.8																																																		
	- Load faktor < 0.3																																																		
D	- Mendekati arus tidak stabil																																																		
	- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 25 KM/jam																																																		
	- V/C ratio < 0.9																																																		
	- Load faktor < 0.7																																																		
22 Meningkatnya Pelayanan Kebersihan dan Pengolahan Sampah dari sumbernya sampai ke TPA	43 Persentase Angkutan Sampah ke TPA	<p>Perhitungan Rumus</p> <p>*. Produksi Sampah Kota = (V1)</p> $V1 = P \times S$ <p>P =Jumlah Penduduk (orang)  S =Produksi Sampah(org/hr) = 2.75 Ltr/Org/hr skala kota besar</p> <p>*. Jumlah Pengelolaan Sampah = (V2)</p> $V2 = A + B + C + D$ <p>A = Volume Angkut Rutin Amrabel  B = Volume Angkut Dump Truk Rutin  C = Volume Angkut Lembur  D = Pengelolaan Sampah Warga</p>	Dinas Kebersihan dan Pertamanan																																																
23 Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	44 Presentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	<p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa yang RTH yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah 20% dan oleh masyarakat 10%</p>																																																	



**Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (outcomes)	Penjelasan/ Form Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
24 Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	45 Persentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)}}{\text{Luas Wilayah Kota (ha)}} \times 100 \%$	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
25 Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	46 Persentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	$\frac{\text{Kegiatan Usaha yang tidak taat peraturan tahun 2014 (tidak punya ijin dan IPAL)}}{\text{Kegiatan Usaha yang diawasi tahun 2014}} \times 100 \%$ $\frac{235}{444} \times 100 \% = 52,52 \%$	Badan Lingkungan Hidup
26 Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	47 Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan kumuh yang dibantu setiap tahun	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
	48 Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni setiap tahun	
27 Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	49 Bertambahnya rumah tangga yang bersanitasi	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi setiap tahun	

**Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (outcomes)	Penjelasan/ Form Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
28 Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	50 Peningkatan Nilai Penanaman Modal 500 juta keatas	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal <b>Perhitungan Rumus</b> $\frac{\text{Jumlah Nilai Penanaman Modal Tahun Berjalan (2015)}}{\text{Jumlah Nilai Penanaman Modal Tahun Lalu (2014)}}$	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	51 Rata-rata waktu penyelesaian Proses pelayanan Perizinan	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Bagian Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak <b>Perhitungan Rumus</b> $\frac{\text{Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan}}{\text{Target Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai Dengan SOP}} \times 100 \%$	





<p>29 Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah</p>	<p>52 Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan</p>	<p><b>Wisatawan</b> adalah Orang yang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan bertamasya yang terdiri dari wisatawan Domestik.</p> <p><b>Wisatawan domestik</b> adalah orang yang berasal dari dalam negeri,</p> <p><b>Kunjungan</b> adalah prihal (perbuatan, proses hasil) mengunjungi berkunjung lawatan</p> <p><b>Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik</b> adalah Persentase kunjungan wisatawan yang berkunjung dibandingkan dengan yang ditargetkan</p> $\frac{\text{Wisatawan Domestik yang berkunjung}}{\text{Wisatawan Domestik yang ditargetkan}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Domestik yang berkunjung = 503.529  Jumlah Domestik yang ditargetkan = 518.420</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{503.529}{518.420} \times 100 \% = 97.13\%$ <p>Kesimpulan :</p> <p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2014 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 97.13%</p> <p>Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri yang mengadakan perjalanan ke daerah .</p> <p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara yang berkunjung dibandingkan dengan yang ditargetkan.</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Wisatawan Manca Negara yang berkunjung}}{\text{Wisatawan Manca Negara yang ditargetkan}} \times 100 \%$ <p>Wisatawan Domestik yang berkunjung = 35,403  Jumlah Wisatawan Domestik yang ditargetkan = 59,318</p> $\frac{35,403}{59,316} \times 100 \% = 59,316\%$ <p>Kesimpulan :</p> <p>Persentase kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2014 dari yang ditargetkan sebesar 59,64%</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>
---	--	---	--

	53 Jumlah rata-rata lama tinggal	<p><b>Jumlah Rata-rata lama tinggal wisatawan</b> adalah Jumlah rata-rata tinggal (hari) Wisatawan Domestik maupun Wisatawan Domestik maupun Wisatawan manca negara yang menetap/ berpergian kesuatu tempat atau daerah yang dikunjungi  Jumlah rata-rata lama tinggal (menginap) Wisatawan Domestik adalah Rekapitulasi (LKU) rata-rata lama menginap (hari) Wisatawan pada setiap hotel dibagi jumlah hotel tempat Wisatawan menginap</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Rekapitulasi Rata-rata lama menginap Wisatawan Domestik seti ap Hotel}}{\text{Jumlah Hotel Tempat Wisatawan Domestik Menginap}}$ <p>Rekapitulasi Rata-rata lama menginap (hari) Wisatawan Domestik = 85.6</p> <p>Jumlah Hotel Tempat Menginap = 41</p> $\frac{85.6}{41} = 2.09 \text{ hari}$ <p>Kesimpulan :  Jumlah Rata-rata tinggal (hari) wisatawan Domestik yang berkunjung adalah 2.09 hari</p> <p>Jumlah rata-rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara adalah Rekapitulasi (LKU) rata-rata lama menginap (hari) Wisatawan Mancanegara pada setiap hotel dibagi jumlah hotel tempat Wisatawan Mancanegara menginap</p> <p><b>Perhitungan Rumus</b></p> $\frac{\text{Rekapitulasi Rata-rata lama menginap Wisatawan Mancanegara}}{\text{Jumlah Hotel tempat Wisatawan Mancanegara Menginap}}$ <p>Rekapitulasi Rata-rata lama menginap (hari) Wisatawan Mancanegara = 65,9</p> <p>Jumlah Hotel Tempat Menginap Wisatawan Mancanegara = 29</p> $\frac{65,9}{29} = 2.27 \text{ hari}$ <p>Kesimpulan :  Jumlah Rata-rata tinggal (hari) wisatawan Mancanegara yang berkunjung adalah 2.27 hari</p>	
30 Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	54 Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<p>Jumlah Nilai Penanaman Modal Tahun erjalan (2015) — Jumlah Nilai Penanaman Modal Tahun Lalu (2014)</p>	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

<p>31 Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)</p>	<p>55 Persentase Koperasi yang aktif</p>	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif tahun N}}{(\text{Jumlah secara keseluruhan yang berbadan hukum -Juml koperasi tidak aktif yang tidak bisa dibina})} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Koperasi yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang masih menjalankan aktivitas usahanya (ada transaksi kopersai), dan aktivitas organisasi (Pengurus, dan anggota memenuhi persyaratan dalam UU No. 25 Tahun 1992, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan)</p>	<p>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM</p>
	<p>56 Persentase Pertumbuhan UMKM</p>	$\frac{(\text{Jumlah UMKM tahun N} - \text{Jumlah UMKM tahun N-1})}{\text{Jumlah UMKM tahun N-1}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Data Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperoleh melalui membandingkan jumlah UMKM pada tahun tertentu (n) dikurangi jumlah UMKM tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan sampai tahun sebelumnya</p>	
<p>32 Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa</p>	<p>57 Persentase peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB</p>	<p>Penjelasan Data PRDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Pontianak diperoleh dari Statistik Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Pontianak adalah sektor Perdagangan dan jasa. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 kontribusi sebesar 24.51 % dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 25.98 % dengan nilai tambah bruto sebesar 4.69 triliun rupiah.</p>	
<p>33 Meningkatkan ketahanan pangan</p>	<p>58 Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita</p>	<p>Penjelasan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan /atau sumber lain, Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.</p> <p>a. Angka kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima (5) tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional pangan dan Gizi (WKNPG) salah satu Rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energy sebesar 2.200 Kkal/Kapita/hari dan Protein 57 Gram/Perkapita/hari</p> <p>b. Cara Perhitungan : Penyediaan pangan terdiri komponen produksi, perubahan stok, import dan eksport Dengan Rumus</p> $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100} \times 100 \%$	<p>Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan</p>

	$\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Protein X BDD}}{100} \times 100\%$	
--	---	--

<p>59 Persentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan</p>	<p>Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>a. Penyediaan Informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masyarakat yang beragam bergizi dan berimbang sesuai standart kecukupan energy dan protein perkapita perhari (PPH)</p> <p>b. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemamfaatan lahan pekarangan dan penguatan Kelembagaan</p> <p>Dengan Rumus</p> $\frac{\text{Energi Masing-masing Komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$	
<p>60 Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan</p>	<p>Dengan Rumus :</p> $SK = \frac{\sum_{I=1}^n SK_i}{n}$ <p>Keterangan :</p> <p>K = H = Untuk Harga P = Untuk Pasokan SHi = Stabilitas Harga Komoditas ke i SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i.</p> <p>I = 1,2,3 ... n N = Jumlah Komoditas, dimana :</p> <p>Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV) Stabilitas pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)</p> <p>Dengan Rumus :</p> $SK = \frac{\sum_{I=1}^n SK_i}{n}$	

Penjelasan :

Stabilitas Harga dan pasokan pangan

- a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan disuatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi Normal.
- b Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan disuatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %

	61 Jumlah penguatan cadangan pangan	<p>Cadangan pangan Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersediannya cadangan pangan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 Ton ekuivalen beras.</li> <li>- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap Provinsi dan Kabupaten/kota.</li> </ul> <p>Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 Ton ekuivalen beras.</p> <p>Dengan Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Kab./Kota}}{100 \text{ Ton}}$	
--	-------------------------------------	---	--

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI